

TATA EKONOMI INTERNASIONAL BARU : SUATU KONFRONTASI YANG BERKEPANJANGAN*

I

Selama seabad literatur Marxis meramalkan jatuhnya kapitalisme. Dia menggariskan proses yang akhirnya akan menghancurkan sistem sosial yang dibangun oleh pasar dan didasarkan atas "milik perorangan atas sarana-sarana produksi". Tetapi kebanyakan dalil yang disusun penulis-penulis Marxis yang dapat dinilai disanggah oleh kejadian-kejadian. Sudah barang tentu dalil-dalil itu secara seenaknya ditafsirkan kembali *ex post facto* untuk menyelamatkan bahasa yang dibutuhkan untuk "maksud-maksud revolusioner". Di antara penyesuaian itu muncul pengakuan baru atas peranan kaum cendekiawan dan penggunaan fasilitas-fasilitas pendidikan massa sebagai alat. Perhatian bagi "perjuangan sosialis untuk membebaskan manusia dan mengakhiri prasejarah" secara berangsur-angsur bergerak melintasi "proletariat industri". Konsep politik memperbaiki dan menampung pranata-pranata dan kelompok-kelompok sosial lain.

Fungsi penting kaum cendekiawan dalam erosi kapitalisme sepenuhnya dipahami oleh Joseph Schumpeter. Doktrin mengenai "gerak maju lewat pranata-pranata intelektual" muncul di

* Saduran karangan Karl Brunner, "The New International Economic Order: A Chapter in a Protracted Confrontation", dalam *Orbis*, Spring 1976, hal. 103-121. Karl Brunner adalah Profesor Ilmu Ekonomi pada Universitas Rochester, New York, dan Universitas Bern, Swiss.

Jerman hampir dua dasawarsa sesudah analisa profetis Schumpeter. Laporrannya mengenai peranan yang dimainkan oleh "para perumus profesional" dalam evolusi yang menghancurkan kapitalisme masih menunjukkan pengertian-pengertian mendalam dan banyak saran yang menarik bagi pembaca-pembaca kontemporer. Peranan inteligensia juga menerangkan gejala lain yang tidak dapat dimasukkan dalam skema Marxis yang baku. Serangan sosialis terhadap kapitalisme, terlepas dari sikap permusuhan agresif blok komunis yang telah berakar dan diamati dengan baik, tahun-tahun belakangan ini dipelopori oleh Dunia Ketiga. Kita mengakui keadaan itu berkat penelitian mendalam Daniel P. Moynihan dalam suatu karangan yang dipuji secara luas dan tepat.¹

Keterbukaan elite intelektual di Dunia Ketiga bagi pengaruh tradisi-tradisi intelektual Barat memperluas jangkauan "proses Schumpeter" atas kawasan-kawasan nonkomunis di luar bangsa-bangsa industri yang telah mapan. Retorika sosialis yang dipelihara oleh wakil-wakil banyak "negara baru" hampir tidak mungkin tidak dikenal. Lagi pula, konsepsi-konsepsi sosialis jelas diungkapkan oleh trend dalam politik ekonomi dan bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang berlaku. Evolusi ini mungkin mempengaruhi kedudukan Amerika Serikat dalam beberapa segi. Bertahun-tahun golongan inteligensia dunia membina sikap anti Amerika dan menyatakan simpati-simpatik politik melawan kepentingan-kepentingan lama kita. Sebagai negara kapitalis terkemuka, Amerika Serikat merupakan lawan atau mungkin hambatan besar bagi aspirasi-aspirasi sosialis. Namun, tanpa aparatur kelembagaan luas yang disediakan organisasi-organisasi PBB evolusi yang dilukiskan di atas itu kiranya hanya akan mempunyai arti kecil bagi Amerika Serikat. Infiltrasi aparatur itu dan pemanfaatannya meningkatkan kekuatan serangan sosialis. Secara demikian Amerika Serikat menghadapi suatu konflik yang serius dan berkepanjangan atas isyu-isyu dasar masyarakat.

Evolusi Organisasi PBB merupakan contoh baik "senjata institusional". Sekali diciptakan sesuai dengan maksud-maksud

1 Lihat "The United States in Opposition", dalam *Commentary*, Maret 1975

baik, lembaga-lembaga menentukan insentif-insentif yang membimbing penggunaan dan perkembangannya dalam arah-arrah yang sangat berbeda dan tidak diperkirakan sebelumnya. Selama 15 tahun terakhir PBB semakin banyak menyarankan atau menyetujui gagasan-gagasan mengenai keharusan memindahkan kekayaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Prasangka ini menghadapkan AS semakin banyak dengan konflik dasar tentang hari depan masyarakat AS. Fasilitas-fasilitas institusional PBB digunakan secara sistematis untuk melancarkan serangan-serangan yang tegas dan luas terhadap "ketidakadilan dan sifat menindas" kapitalisme AS yang kelihatan bertentangan secara tajam dengan "keadilan dan pembebasan" yang dicapai di "negara-negara sosialis".

Orang bertanya-tanya apakah media massa dan wakil-wakil kita mengerti seriusnya tantangan itu. Kaum birokrat tradisional dan diplomat-diplomat di Departemen Luar Negeri rupanya tidak bersedia atau tidak mampu menghadapi situasi itu. Setiap perhatian tegas atas tantangan itu melanggar pola tradisional prosedur diplomasi, dan ini mungkin menerangkan sikap tidak menentu yang dibina pada beberapa kesempatan oleh wakil-wakil AS.¹ Ketidakpastian serupa itu sampai batas-batas tertentu mungkin juga dipengaruhi oleh insentif-insentif institusional yang menentukan serangkaian kepentingan yang bertumpang tindih bagi birokrasi-birokrasi nasional maupun internasional dan beroperasi untuk memperlemah perhatian yang dicurahkan oleh sementara birokrasi nasional untuk kepentingan-kepentingan nasional. Ini juga menerangkan reaksi birokrasi-birokrasi dan diplomat-diplomat gaya lama dari Eropa terhadap kekecualian penting dalam pemerintahan kita. Moynihan rupanya memahami hakikat tantangan itu dan prospek konfrontasi. Dalam

1 Laporan yang diterbitkan oleh koresponden *Neue Zurcher Zeitung* Agustus 1975 pada kesempatan Konperensi PBB tentang Pencegahan Kejahatan yang diadakan di Jenewa sangat baik mengutarakan hal itu. Laporan ini meringkas serangan-serangan terhadap negara-negara Barat dan Amerika Serikat khususnya serta mencatat bahwa wakil-wakil Barat diam, sambil menyatakan bahwa mereka tidak mau menanggapi serangan-serangan itu untuk "menghindari polemik". Sikap ini mengungkapkan suatu kegagalan serius untuk memahami kenyataan internasional, atau suatu putusan salah yang serius mengenai strategi Barat untuk menghadapi serangan-serangan itu.

kegagalan pemerintah-pemerintah dan wakil-wakil AS terlibat lebih banyak daripada semata-mata penerimaan retorika sosialis yang menghukum masyarakat kita. Retorika itu menyertai usaha-usaha tekun untuk memperluas aparatur institusional organisasi-organisasi internasional. Lagi pula, perluasan itu secara berangsur-angsur akan memaksakan, paling tidak menurut maksud yang dinyatakan, pembatasan-pembatasan yang meningkat atas pengaturan intern kita. Dengan demikian "gerak maju lewat lembaga-lembaga internasional" menjadi salah satu sarana untuk lambat laun mengalahkan kapitalisme AS dan mengubah masyarakat AS ke tingkat "keadilan, persamaan dan kebebasan" yang harus dicapai menurut teori sosialis yang membimbing banyak wakil Dunia Ketiga. Bahkan jika retorika itu hanya merupakan alat untuk membina perasaan salah inteligensia AS dengan maksud untuk mendorong pemindahan kekayaan, pemindahan serupa itu memerlukan pengaturan institusional yang mengubah sifat lama masyarakat Amerika Serikat.

II

Pola umum yang memerintah lembaga-lembaga PBB kiranya dapat dijelaskan dengan dua resolusi yang diterima Majelis Umum pada 9 Mei 1974. Pada hari itu Majelis Umum menerima "Deklarasi Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru" yang dimaksud untuk "menghilangkan jurang yang makin lebar antara negara-negara maju dan berkembang". Deklarasi itu mengakui bahwa "sisa-sisa . . . dominasi kolonial . . . dan neokolonialisme dalam segala bentuknya" termasuk "hambatan-hambatan paling besar bagi pembebasan dan kemajuan negara-negara berkembang". Juga dikatakannya bahwa "suatu perkembangan yang tenang dan berimbang" tidak mungkin dicapai di bawah "tata ekonomi internasional yang berlaku", dan ditandaskan bahwa warisan tata ekonomi itu "bertolak belakang dengan perkembangan-perkembangan dalam hubungan-hubungan politik sekarang ini". Dengan demikian dituntut agar negara-negara berkembang ikut serta secara aktif, penuh dan sama "dalam perumusan dan penerapan keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat internasional". Dan dengan demikian kita membaca bahwa "kerja sama internasional bagi pem-

bangunan adalah tujuh bersama dan kewajiban bersama semua negara". "Kerja sama seluas mungkin semua negara di mana perbedaan-perbedaan yang ada dapat dihilangkan" harus dipelihara; demikian pun "kedaulatan permanen setiap negara atas sumber-sumber daya alamnya dan semua kegiatan ekonominya".

Seminggu kemudian Majelis Umum PBB itu sendiri melontarkan suatu resolusi pelengkap yang diperkenalkan sebagai "Aksi Program Pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru". Kolonialisme dan neokolonialisme sekali lagi dikutuk dan diserang dengan hebatnya. Tindakan-tindakan yang diusulkan dibagi dalam sektor-sektor yang meliputi perdagangan dan bahan mentah, pengangkutan, sistem moneter internasional, pengaturan perusahaan-perusahaan multinasional, dan serangkaian sarana untuk memperkuat PBB dalam bidang kerja sama ekonomi internasional. Ketentuan-ketentuan di bawah item pertama hendaknya menjamin pendapatan nyata yang lebih tinggi dari ekspor, lebih banyak bantuan dan sumbangan keuangan dalam salah satu bentuk. Biaya pengangkutan (bagaimana juga) harus diturunkan, paling tidak untuk negara-negara berkembang. Dalam sektor masalah-masalah moneter internasional, negara-negara berkembang ingin "dilibatkan sepenuhnya sebagai partner yang sama" dalam seluruh pembuatan keputusan. Langkah kembali ke suatu sistem nilai tukar yang tetap disebutkan dengan sedikit tekanan. Usul ini minta perhatian tambahan bagi persediaan likuiditas internasional yang akan dikaitkan dengan grant keuangan kepada negara-negara berkembang. Jadi kaitan ini dihubungkan dengan pemulihan sistem nilai tukar tetap. Seksi terakhir Program Aksi menyebutkan suatu jadwal luas untuk menggunakan atau memperluas lembaga-lembaga PBB dan secara demikian meningkatkan kedudukan tawar-menawar negara-negara Dunia Ketiga.

Dalam kasus beberapa pembaca resolusi-resolusi PBB tidak mengerti arti penggunaan kedudukan itu yang ditutupi dengan kalimat-kalimat bagus tentang keadilan, persamaan, perdamai-

an, kebebasan dan kemanusiaan yang diucapkan oleh wakil-wakil suatu kumpulan besar tiran kecil maupun besar, kita beruntung dapat menyebutkan tafsir berguna yang diberikan oleh seorang moralis. Pada 17 Maret 1975 Gunnar Myrdal menyampaikan suatu Kuliah Peringatan Nobel tentang "Isyu Persamaan dalam Perkembangan Dunia". Pandangan dunia Myrdal mulai dengan "imperium kolonial" lama yang mengabaikan atau mungkin memeras negara-negara jajahan mereka yang kurang berkembang, yang "mengalami stagnasi kemiskinan". Meluasnya kemerdekaan dalam periode sesudah perang mendorong timbulnya suatu kesadaran akan kepincangan antara negara-negara maju dan berkembang. Suatu isyu moral muncul yang harus mendapat perhatian kita. Myrdal mengakui bahwa beberapa bantuan diberikan selama tahun-tahun itu, tetapi menganggap bantuan serupa itu sama sekali tidak memadai dan biasanya diberikan dengan motif-motif salah (kecuali, sudah barang tentu, oleh Swedia). Baik moralitas maupun akal sehat pada hematnya menuntut pembentukan suatu tata dunia baru. Tata dunia baru ini harus dirancang untuk menghilangkan ketidaksamaan dan memasukkan keadilan sama rata (egalitarian).

Asas sama rata secara langsung mengungkapkan moralitas yang wajar, dan akal sehat diungkapkan dalam pendapat Myrdal bahwa pengurangan berarti dalam tingkat konsumsi masyarakat-masyarakat Barat adalah demi "kepentingan individual dan kolektif" semua anggota masyarakat-masyarakat itu. Implementasi moralitas dan akal sehat itu memerlukan suatu perencanaan nasional untuk mencapai tingkat konsumsi yang lebih rendah untuk melepaskan sumber-sumber daya guna disalurkan ke negara-negara berkembang. Khususnya dia mencatat bahwa AS harus disiapkan "untuk memulai dan bekerja sama dalam aksi berencana antar pemerintah secara yang menuju 'suatu tata dunia baru' yang diminta oleh negara-negara berkembang, yang pada gilirannya akan memaksa pembatasan rasional penggunaan sumber-sumber daya kita secara berlimpah". Jadi tata dunia baru itu memasukkan suatu sistem "perencanaan nasional terpadu" semata-mata untuk menghasilkan suatu penyaluran masif kekayaan dari negara-negara industri ke kebanyakan anggota organisasi PBB. Myrdal cukup jelas memahami bahwa tata

dunia baru itu tidak dapat diwujudkan tanpa perubahan-perubahan institusional besar yang terkandung dalam "perencanaan antar pemerintah nasional". Sepintas lalu dia mencatat bahwa suatu organisasi ekonomi yang mengandalkan pasar rupanya tidak kondusif untuk tindakan-tindakan rasional atas permintaan-permintaan konsumsi.

Dengan demikian isu yang dihadapi AS dibatasi dengan jelas. Kita diminta oleh kebanyakan anggota PBB dan "pemimpin-pemimpin intelektual dan moral" untuk menerima dan memulai suatu transisi ke suatu dunia sosialis dan suatu masyarakat sosialis. Ada baiknya di sini menerangkan cara kita menggunakan istilah "sosialis" yang dilakukan dalam diskusi ini. Dua ciri organisasi sosial yang erat berkaitan menentukan segi-segi penting kehidupan manusia: sejauh mana alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya dibimbing oleh harga-harga yang dibentuk dalam pasar dan luas atau isi hak-hak milik perorangan. Tiada masyarakat tanpa pasar dan kegiatan-kegiatan yang dibimbing harga-harga, tiada masyarakat tanpa milik perorangan atas sumber-sumber daya atau penggunaan sumber-sumber daya itu.¹ Adalah penting dalam hubungan ini memahami hakikat dan akibat-akibat suatu "struktur hak"; akibat-akibat sangat berbeda-beda menurut jangkauan, keterbukaan, kemungkinan diramalkan, stabilitas dan kemungkinan diperdagangkannya hak-hak itu.

Program-program sosialis pada pokoknya menurunkan berbagai dimensi hak-hak perorangan dan jangkauan mekanisme pasar. Pembatasan ini secara implisit menolak konsepsi Lange-Lerner tentang masyarakat sosialis yang berorientasi pada pasar. Pengertian mereka pasti mungkin, tetapi hendaknya juga diakui

1 Pengamat-pengamat Republik Demokrasi Jerman mencatat bahwa para penjaga pintu pada Pekan Raya Dagang Leipzig menuntut US\$ 80 "untuk pemakaian pribadi" kamar kecil selama pekan raya itu. Agar dapat pergi ke dokter dengan cepat orang harus membayar ekstra; demikian pun agar mendapat pelayanan yang lebih cepat dari montir-montir mobil. Di samping sistem yang resmi dan ditetapkan secara formal, telah muncul suatu sistem pasar informal yang didasarkan atas apa yang dianggap hak penjaga pintu, dokter, montir, dan lain-lain. Mereka semua menguasai suatu dimensi pemakaian sumber-sumber daya tertentu yang menentukan kesempatan-kesempatan transaksi.

bahwa pengertian itu hanya mempunyai sedikit relevansi empiris. Erosi hak-hak perorangan atas sumber-sumber daya dan penggunaannya biasanya disertai, sebagai fakta pengalaman, dengan digantikannya pasar dan harga-harga yang ditentukan pasar dengan suatu mekanisme alokasi politik-administratif. Pengekangan hak-hak perorangan ini, menurut literatur dan retorika sosialis, merupakan suatu kondisi yang perlu bagi transisi dari "pra-sejarah ke sejarah manusia" — suatu kondisi yang perlu untuk menjamin martabat manusia dan suatu "tingkat mutu hidup yang berarti".

Pandangan ini memasuki diskusi pada konperensi-konperensi PBB mengenai banyak isu seperti penduduk, pangan, polusi atau kejahatan. Hal itu juga terungkap dengan jelas dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan UNCTAD, UNIDO atau Majelis Umum mengenai TEIB yang harus dibentuk. Tantangan yang dihadapi AS harus diakui sepenuhnya dan diterima. Kita hendaknya juga menerima tanpa ragu-ragu kriteria yang diajukan untuk menilai suatu organisasi sosial, yaitu kriteria yang dirumuskan dalam istilah-istilah "martabat manusia dan mutu hidup". Biarpun kabur, sedikit ambivalen dan memerlukan uraian lebih lanjut bagi analisa yang memadai, istilah-istilah ini bukanlah maksud diskusi sekarang ini. Di sini cukup kiranya menandakan setegas-tegasnya bahwa perjuangan kapitalisme tidak boleh takut akan ukuran-ukuran itu. Sebaliknya, dirumuskan secara jelas, ukuran-ukuran itu harus diterima sepenuhnya sebagai ukuran penilaian kita yang relevan.

Dalam hubungan ini sungguh-sungguh ada suatu isu moral dalam memilih antara organisasi-organisasi sosial, dan adalah suatu kewajiban untuk mengetahui guna mengulas dengan sarana-sarana yang bisa diandalkan *perbandingan* berfungsinya berbagai struktur institusional. Analisa ini meliputi pola manusiawi yang dibina oleh berbagai pengaturan, sikap-sikap yang diperkuat lagi dan nilai-nilai yang diijinkan. Justru dalam istilah-istilah ini pembelaan kapitalisme harus dan dapat dilakukan. Tetapi sejauh ini kita mempunyai sedikit bukti bahwa wakil-wakil AS pada organisasi-organisasi dan konperensi-konperensi internasional mengerti hakikat tantangannya atau menganggap

berguna untuk menyesuaikan konfrontasi itu dalam percaturan politik mereka yang lazim. Kelalaian mereka pada hemat kami tidaklah sama sekali tidak merugikan bagi kepentingan-kepentingan jangka panjang kita. Serangan terhadap sistem sosial kita adalah suatu fakta yang persisten dan pervasif seperti terungkap dalam kata-kata dan kalimat-kalimat yang dimasukkan dalam dokumen-dokumen PBB.

III

Suatu tema yang dominan dan mendasar yang dinyatakan oleh banyak rumusan yang dijumpai dalam retorika Dunia Ketiga berkisar pada ide Marxis Leninis "pemerasan". Perluasan gagasan asli Marx oleh Lenin ke hubungan-hubungan internasional menerangkan adanya perbedaan kekayaan antara bangsa-bangsa industri Barat dan Dunia Ketiga dengan istilah-istilah sejarah kolonial, atau lebih umum, dengan istilah-istilah bentuk-bentuk paksaan politik yang halus dan pervasif. Pemerasan Barat membuat miskin Dunia Ketiga dan memperkaya bangsa-bangsa Barat. Cerita itu secara mengesankan dapat diterima dan telah sangat mempengaruhi sikap-sikap umum di luar anggota-anggota setia cabang Leninis dari kaum Marxis. Orang sering menjumpai pernyataan bahwa koloni-koloni dan wilayah-wilayah yang dijajah mengalami stagnasi dalam kemiskinan, sedangkan kemajuan hanya terjadi sesudah kemerdekaan. Kuliah Nobel Myrdal memaparkan tema ini, dan retorika resolusi-resolusi PBB tersebut di atas jelas mengungkapkan pandangan itu.

"Dekolonisasi" digambarkan sebagai suatu kondisi yang perlu dan primer bagi kemajuan ekonomi. Kemajuan itu rupanya tidak mungkin dicapai di bawah rezim kolonial. Akan tetapi juga nampak bahwa penghapusan kolonialisme tidak cukup. Doktrin sosialis mengklaim bahwa pemerasan berlangsung terus dalam bentuk baru, yang dicakup dalam istilah "neokolonialisme". Neokolonialisme muncul bilamana terjadi transaksi swasta antara bangsa-bangsa "maju" dan "berkembang". Khususnya bilamana perusahaan-perusahaan swasta melakukan bisnis di negara-negara berkembang. Dalam arti tertentu label itu diberikan kepada setiap transaksi yang terjadi dengan harapan

quid pro quo. Penghapusan neokolonialisme pada hakikatnya jadi mencakup penyaluran kekayaan ke Dunia Ketiga yang diinginkan — suatu arus nyata tanpa *quid* untuk *quo*-nya.

Orang akan mudah mengakui adanya unsur rasional dalam gagasan-gagasan itu. Gagasan-gagasan itu memberi peluang untuk membenarkan penyedotan kekayaan. Juga memberikan kepada kaum elite dan birokrasi yang mapan di Dunia Ketiga kesempatan untuk memperkaya diri.¹ Kesempatan-kesempatan itu untuk sebagian disebabkan oleh tanggapan-tanggapan bengong yang dijumpai di kalangan intelegensia Amerika Serikat. Tema dasar itu juga membenarkan klaim akan "ganti rugi" yang diajukan kepada negara-negara maju sebagai kompensasi bagi "kerugian-kerugian jelas" yang disebabkan kolonialisme dan neokolonialisme. Definisi elastis "neokolonialisme dalam segala bentuknya" dan tuntutan akan ganti rugi yang terdapat dalam resolusi-resolusi PBB membatasi suatu undangan terbuka dengan insentif pervasif untuk menggunakan fasilitas-fasilitas PBB yang semakin luas bagi suatu arus program aksi tanpa akhir yang menimbulkan tekanan-tekanan politik atas pemerintah-pemerintah Barat. Tuntutan yang persisten itu juga memelihara perhatian media dan perumus-perumus profesional Barat.

Prospek konfrontasi berlarut-larut itu mengisyaratkan bahwa retorika sosialis dengan tuntutan-tuntutan yang kelihatan penting itu tidak boleh dianggap sepi dengan cara yang dikembangkan oleh wakil-wakil AS pada kejadian-kejadian di PBB. Rupanya adalah penting bahwa klaim-klaim dan retorika yang menyertainya disanggah dengan tegas dan secara eksplisit. Kadang-kadang orang bertanya-tanya apakah wakil-wakil Barat cukup sadar akan perjuangan dubius di bawah retorika itu. Catatan-catatan tertentu tentang kelemahan yang inherent pada klaim sosialis rupanya wajar dalam konteks ini.

Pertama kita harus mencatat bahwa "pemerasan" menurut pembatasan doktrin sosialis terjadi bilamana sumber-sumber

1 Pembaca mungkin ingin menunjuk pada penelitian Omotunde Johnson mengenai "The Economics of Corrupt Government", *Kyklos*, 28 (1975), nomor 1

daya (sarana-sarana produksi) dimiliki swasta. Luasnya pemerasan itu dapat diukur dengan bagian pendapatan nasional yang ditelan oleh pemilikan sumber-sumber daya. Jadi segala transaksi yang terjadi di bawah pengaturan kapitalis sudah barang tentu memeras. Adalah penting untuk mengakui bahwa bahasa ini memiliki maksud motivasi yang membimbing tindakan-tindakan moral politik. Dia digunakan untuk mengemukakan bahwa penghapusan "pemilikan sarana-sarana produksi oleh swasta" membebaskan massa pekerja dan umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun martabat manusia. Akan tetapi cerita Marxis, biarpun plausibel seperti banyak dongeng lain, justru gagal dalam keutamaan-keutamaan yang paling dipuji. Penulis-penulis Marxis menekankan pengertian yang unggul mengenai hubungan-hubungan sosial penting yang diringkas dalam *Produktionsverhältnisse*, yaitu hubungan antar manusia yang ditentukan oleh hubungan manusia dengan sumber-sumber daya produksi. Tetapi keterangan Marxis itu sama sekali melupakan struktur hak-hak penting yang membentuk proses politik, sosial dan ekonomi, dan oleh sebab itu gagal memberikan suatu keterangan sistematis bagi kejadian-kejadian politik ekonomi atau proses-proses di bawah sosialisme.

Bukan suatu kebetulan bahwa tulisan-tulisan dan retorika sosialis tentang negara sosialis hanya sedikit melintasi suatu uraian yang pada pokoknya metaforis atau metafisis bercampur dengan sedikit pendekatan Nirvana. Juga bukan kebetulan bahwa literatur Marxis, dan lebih umum sosialis, mengembangkan suatu "kesalahan Karamasov". Orang mencatat contoh-contoh ketidakadilan, frustrasi atau tiadanya kebahagiaan yang diajukan sebagai bukti menentang kapitalisme. Orang juga mencatat bahwa di suatu negara sosialis kelompok-kelompok penduduk tertentu menikmati perumahan yang lebih baik daripada sebelum "pembebasan sosialis". Ini digunakan secara sugestif untuk mengatakan bahwa seluruh pola umumnya menjadi lebih baik. Komentar-komentar dan observasi-observasi serupa itu merupakan suatu siasat yang berguna dalam suatu perjuangan politik, tetapi sedikit memberikan informasi berupa penilaian sistematis tentang alternatif-alternatif pengaturan institusional dan organisasi-organisasi ekonomi. Penilaian serupa itu

tidak mungkin di bawah suatu konsepsi Marxis atau sosialis. Doktrinnya tidak memberikan sarana intelektual dan persepsi analitis mengenai berfungsinya lembaga-lembaga sosialis maupun pengertian tentang insentif-insentif yang muncul di bawah lembaga-lembaga itu dan hakikat proses sosial yang diakibatkannya. Oleh sebab itu dia biasanya gagal memberikan suatu tafsir yang relevan atas masalah-masalah yang secara tipis muncul di bawah organisasi-organisasi sosialis. Krisis pertanian yang permanen di US merupakan suatu contoh baik situasi umum itu.

Usaha-usaha filsuf-filsuf Marxis untuk bergulat secara serius dan jujur dengan operasi institusional dan pola tingkah laku yang ditentukan di bawah rezim-rezim sosialis mengungkapkan secara terperinci kelemahan-kelemahan sosiologi Marxis. Model sosiologis manusia yang digunakan dalam literatur itu menyembunyikan kenyataan dan mencegah akses intelektual ke jawaban-jawaban manusia atas insentif-insentif yang inherent pada pengaturan-pengaturan institusional yang berbeda-beda. Tidaklah mungkin menerangkan sistem pembayaran-pembayaran sambilan atau ekstra dan transaksi-transaksi "tidak resmi atau swasta" yang terjadi di bawah lembaga-lembaga sosialis, pola korupsi akibat pengaturan-pengaturan ini, struktur kekuasaan atau hakikat kompetisi politik, dan masalah-masalah serupa.¹

IV

Suatu sikap atau komitmen semi-religius yang sering menggantikan analisa dan bukti yang dibutuhkan tidak banyak menolng suatu penilaian yang bermanfaat dan rasional tentang alternatif-alternatif sistem sosial. Tetapi penilaian yang luas

1 Suatu pembahasan model sosiologis ini dapat ditemukan dalam sebuah prasaran yang disiapkan oleh William Meckling untuk Seminar Interlaken Internasional Kedua tentang Analisa dan Ideologi, yang diadakan Juni 1975. Prasaran itu diterbitkan tahun 1976 oleh *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*. Suatu sidang pleno Seminar Interlaken Internasional Ketiga tentang Analisa dan Ideologi akan menjajaki persoalan itu lebih lanjut dengan prasaran-prasaran yang disampaikan oleh Gerard Gafgen-Hans Georg Monissen bersama-sama dan oleh Willi Meyer. Di antara tulisan-tulisan serius yang diterbitkan oleh filsuf-filsuf Marxis adalah yang diterbitkan oleh kelompok di Universitas Beograd, khususnya Stojanovich.

serupa itu menentukan argumen pokok kapitalisme. Ini bukan suatu pembelaan yang berdasarkan keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan sebagainya yang dijamin dan seragam; dia lebih menekankan keadaan bahwa suatu sistem yang didasarkan atas hak-hak perorangan yang luas secara lebih efektif meniadakan kekuasaan sewenang-wenang daripada alternatif organisasi sosial mana pun. Sekalipun "keadilan, kebebasan dan persamaan" tidak dijamin, semuanya itu memberikan lebih banyak kesempatan dan kesempatan-kesempatan yang lebih persisten bagi keadilan dengan biaya lebih kecil (daripada nilai-nilai manusia yang direbut atau dikorbankan). Dia juga memberikan lebih banyak alternatif dengan harga lebih ringan daripada pengaturan-pengaturan institusional yang dipaksakan oleh rezim sosialis. Khususnya lebih banyak alternatif untuk pekerjaan dan untuk menyatakan bermacam-macam gaya hidup merongrong pola-pola perbudakan dan penjajahan.

"Lembaga-lembaga terbuka" kapitalisme tidak menjamin "persamaan", tetapi mengendorkan lebih banyak warisan perbedaan-perbedaan yang mapan daripada "lembaga-lembaga tertutup", masyarakat-masyarakat sosialis yang dibenarkan dengan suatu retorika sama rata. Lagi pula biaya perbedaan pendapat — diungkapkan dalam kesempatan-kesempatan yang dikorbankan oleh perbedaan pendapat politik, intelektual, moral atau artistik — pasti positif dalam setiap sistem sosial yang pernah diwujudkan atau akan diwujudkan. Keadaan ini sering mendukung suatu kebutaan khusus yang diungkapkan dengan dalil-dalil absolutis bahwa kebebasan atau kemerdekaan juga tidak terdapat di kebanyakan sistem sosial. Besarnya secara sistematis dikaitkan dengan pola struktur hak-hak yang berlaku, dan biasa berbeda dengan luas, isi dan terandalkannya hak-hak milik swasta. Suatu erosi persisten hak-hak itu akhirnya meningkatkan biaya perbedaan pendapat dan tingkah laku nonkonformis dalam politik, moral, literatur dan kesenian.

Akhirnya, kesempatan-kesempatan yang lebih besar dan lebih banyak alternatif yang tersedia dengan harga lebih ringan bagi rata-rata orang di bawah sistem hak-hak milik perorangan menjamin perlindungan martabat manusia yang lebih baik daripada yang dapat diharapkan di bawah suatu aparat yang esensial politik-administratif. Bahwa kaum birokrat dan elite intelektual

yang mapan di Dunia Ketiga lebih menyukai pengaturan-pengaturan sosialis kiranya mudah dimengerti karena serangan terhadap hak-hak milik perorangan dan penggantian pasar dengan lembaga-lembaga politik administratif, meningkatkan kekuasaan birokrasi maupun elite. Secara luas mengandalkan pasar merongrong kekuasaan serupa itu dan mengurangi kesempatan untuk memindahkan kekayaan dan menjadi kaya lewat kegiatan-kegiatan politik. Beberapa anggota elite dan birokrasi mengakui adanya potensi bagi imbalan-imbalan luas — secara yang merugikan warga negara biasa — di bawah pengaturan sosialis.

Suatu retorika yang sesuai dan sangat jelas menyembunyikan pemindahan kekayaan intern ke tangan elite dan birokrat yang mapan. Dia juga merupakan alat penting dalam ofensif intelektual untuk pemindahan kekayaan internasional. Dalam keadaan ini adalah vital untuk memahami secara saksama prestasi manusia organisasi sosial yang diberi merek (label) "kapitalisme". Sudah barang tentu kita menemukan kantong-kantong penindasan dan ketidakadilan dalam perekonomian-perekonomian kapitalis. Intelegensia dunia tak henti-hentinya menekankan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Chili, Yunani di bawah junta militer, Rhodesia, Afrika Selatan, Spanyol dan mungkin juga Brazil. Orang memang dapat melihat penindasan di negara-negara itu, dan biaya perbedaan pendapat rupanya lebih tinggi daripada di negara lain di Eropa Barat atau AS. Tetapi retorika histeris inteligensia dunia jelas membuang rasa proporsi dalam menilai situasi manusia. Biaya tingkah laku nonkonformis di negara-negara itu jauh di bawah tingkat yang terdapat di negara-negara yang menerima dogma Marxis atau di banyak negara sosialis yang mengaku anggota Dunia Ketiga.

Observasi ini tidak membenarkan sikap puas dengan lembaga-lembaga kita atau penerimaan pola-pola sosial di negara-negara tersebut, tetapi perlu ditekankan. Dia memperingatkan kita bahwa lebih banyak hak milik perorangan tidak cukup untuk membuang paksaan dari pembatasan-pembatasan politik atas kegiatan-kegiatan perorangan. Namun negara-negara itu juga menyajikan uraian-uraian tema kita yang berguna. Pertama, di negara-negara itu suatu bidang penting hidup sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan ekonomi

tetap bebas dari paksaan dan gangguan terperinci. Diskusi-diskusi politik dalam kelompok-kelompok kecil atau privat sangat mungkin dengan sedikit risiko dan harga. Bahkan terdapat diskusi umum segi-segi sosial atau politik yang bukan tidak penting. Lagi pula — dan ini adalah sangat penting — tetap adanya banyak hak swasta yang dapat diandalkan mengurangi atau memperkecil kemungkinan sistem politik yang membatasi untuk bertahan. Hak-hak milik yang pervasif mencegah terjadinya "pelebagaan" sistem politik dan secara demikian meningkatkan kemungkinan transisi ke suatu organisasi politik sosial dengan lebih banyak kebebasan, yaitu mengandung biaya lebih ringan bagi tingkah laku nonkonformis.

Kita mencatat beberapa diskusi serius dan harapan-harapan baik mengenai munculnya Spanyol dari bentuk-bentuk membatu diktatur Falangis. Perkembangan-perkembangan serupa di Chili dan Brazil juga sangat mungkin. Adakah orang yang secara serius mengemukakan bahwa sesudah Tito meninggal Yugoslavia akan membuka lembaga-lembaganya, atau bahwa US akan mengizinkan "beribu-ribu bunga mekar" sesudah Brezhnev meninggal? Jawaban adalah jelas, dan perbedaan dalam kesempatan-kesempatan dan prospek berakar pada pola hak-hak yang berlaku. Kita akhirnya disadarkan bahwa suatu *Gulag Archipelago* secara tipis muncul di bawah suatu rezim sosialis dan dengan itu berkembang penggunaan teror sewenang-wenang secara sistematis untuk memaksa warga-warga negara ke dalam suatu pola konformitas.¹

1 Suatu ulasan singkat kiranya perlu ditambahkan sehubungan dengan Rhodesia-Zimbabwe dan Afrika Selatan. Bahwa apartheid mengandung pemindahan kekayaan kepada penduduk kulit putih dengan jelas diakui oleh serikat-serikat buruh Afrika Selatan pada 1920-an. Pada waktu itu pasar beroperasi menuju integrasi berangsur-angsur, dan hal ini khususnya terjadi di "pasar perkawinan". Tetapi pengakuan bahwa suatu pemindahan kekayaan intern adalah inheren dalam apartheid tidak boleh membuat kita lupa bahwa kesejahteraan ekonomi rakyat kulit hitam di Afrika Selatan rata-rata adalah lebih tinggi daripada tingkat yang dicapai di negara Afrika mana pun. Orang juga harus mencatat pernyataan menarik yang dikeluarkan di Mozambik oleh salah satu pemimpin kulit hitam Rhodesia-Zimbabwe. Sambil menegaskan bahwa di Zimbabwe akan dibentuk suatu rezim sosialis yang ketat, dia memperingatkan bahwa tiada tempat bagi politisi kulit hitam yang bersaing yang ideologi sosialisnya dicurigai. Suatu perbandingan pola-pola mendaftang di Mozambik, Zimbabwe dan Angola dengan pola-pola kehidupan yang mungkin di "Rhodesia kulit putih yang menindas" atau apartheid Afrika Selatan pasti menarik.

Rupanya adalah penting untuk menandakan bahwa pola-pola perbudakan dan penjajahan yang dikembangkan oleh mekanisme politik administratif yang luas mengurangi akses ke alternatif-alternatif di banyak bidang kehidupan. Suatu trend menuju munculnya mekanisme serupa itu adalah implisit dalam program Myrdal. Pendapat otoriterinya jelas terungkap dalam konsepsi khususnya tentang "rasionalitas" — artinya penilaiannya dan penilaian kelompok teman-temannya harus menang. Konsumen rata-rata "harus diberi tahu apakah yang baik baginya". Myrdal secara efektif menjadi model perumus profesional yang gagal mengetahui bahwa kebanyakan orang mempunyai gagasan pasti tentang mutu hidup mereka. Banyak orang lebih suka dengan kebiasaan-kebiasaan konsumsi yang memperpendek hidup daripada dengan kemungkinan mengalami usia tua yang tidak berguna. Banyak orang lebih suka main ski, naik gunung, balap mobil atau terbang daripada dengan suatu eksistensi yang aman dan berat "rasional". Myrdal memusatkan perhatiannya atas suatu isu sentral jaman kita dengan mengajukan klaim sombong "pemimpin-pemimpin intelektual dan moral" untuk menguasai nasib masyarakat-masyarakat kita. Usul-usul untuk membentuk suatu aparatur administratif yang menyeluruh secara logis berpangkal pada klaim ini dan pada pandangan pendukung bahwa kebanyakan orang adalah tidak tahu dan tidak mampu menangani kepentingan-kepentingan mereka sendiri.

V

Dalam konteks ini "tema kolonial" yang dikembangkan dengan semangat begitu besar oleh Dunia Ketiga perlu mendapat perhatian khusus kita. Dia menentukan semangat moral dan memberikan suatu pembenaran kepada klaim akan suatu TEIB, tetapi retorika pemerasan "kolonial" atau "neokolonial" oleh bangsa-bangsa industri Barat adalah suatu dongeng yang dibuktikan kepalsuannya oleh kejadian-kejadian sejarah. Menurut dalil pemerasan yang baku, kemiskinan dan stagnasi ekonomi akan meningkat sejalan dengan ramainya transaksi dengan ekonomi-ekonomi kapitalis. Namun kita mengamati secara sistematis kebalikannya. Selama 100 tahun terakhir kawasan-kawas-

an dengan paling sedikit perdagangan, paling sedikit pengaruh kapitalisme dan hanya dengan transaksi-transaksi marginal dengan bangsa-bangsa Barat tetap tinggal kawasan-kawasan yang paling miskin dan macet (misalnya Ethiopia dan Afghanistan). Hampir tanpa kekecualian koloni-koloni mengalami banyak kemajuan dalam kedudukan kolonial dan mengambil untung dari suatu arus sumber-sumber daya yang nyata dari negara-negara industri. Perkembangan dramatis penduduk, perbaikan harapan hidup, munculnya pengangkutan umum dan kota-kota modern adalah akibat hubungan ekonomi dengan Barat. Investasi-investasi Barat menaikkan pendapatan nyata di atas tingkat yang akan dicapai tanpa investasi itu.

Lukisan ini berlaku tak peduli repatriasi keuntungan tertentu dari investasi-investasi itu. Demikian pun penggunaan sumber-sumber daya yang tak habisnya ikut meningkatkan pendapatan nyata, paling tidak pada waktunya. Dan dengan investasi tabungan yang berasal dari tingkat pendapatan yang meningkat pendapatan nyata dapat terus menerus ditingkatkan. Soal ini dapat dirumuskan secara efektif dalam kata-kata Peter Bauer, yang telah mempelajari masalah-masalah yang dihadapi ekonomi-ekonomi berkembang selama bertahun-tahun. Khususnya mengenai Afrika dia berkata:

”Semua dasar dan komponen kehidupan ekonomi dan sosial modern yang ada di sini dewasa ini dibawa oleh orang-orang Barat, hampir seluruhnya dalam era penjajahan. Hal itu meliputi dasar-dasar seperti keamanan umum dan hukum serta tertib; lalu lintas beroda (Afrika di sebelah selatan Sahara tidak pernah menemukan roda); pengangkutan mekanis (pengangkutan dengan uap atau bensin sebagai ganti otot — hampir seluruhnya otot manusia di Afrika Hitam); jalan-jalan, jalan-jalan kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan buatan manusia; bentuk-bentuk baru uang (ganti barter atau uang komoditi seperti kece-kece, lempengan besi atau botol jenever); aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan ekonomi; kota-kota dengan gedung-gedung besar, air dan jaringan got; kesehatan masyarakat dan rumah-rumah sakit, dan pengendalian penyakit-penyakit endemi dan epidemi; dan pendidikan formal.

Pendeknya, selama seratus tahun yang lalu, kontak dengan Barat telah mengubah bagian-bagian luas Dunia Ketiga menuju perbaikan. Asia Tenggara dan Afrika Barat merupakan suatu contoh dengan dokumentasi yang baik. Misalnya pada 1890-an Malaya adalah suatu daerah kampung-kampung dan desa-desa nelayan yang sedikit penduduknya. Sekitar 1930 dia telah menjadi suatu negara dengan kota-kota yang padat, perdagangan ramai dan suatu sistem jalan-jalan yang hebat, terutama berkat industri karet yang didatangkan dan dikembangkan oleh orang-orang Inggris. Contoh lain, sebelum 1890-an tiada produksi kakao di negara yang kini adalah Ghana dan Nigeria,

ataupun ekspor kacang atau kapas, dan hanya sedikit ekspor minyak kelapa dan kopra. Barang-barang itu kini adalah komoditi perdagangan dunia, semuanya hasil orang-orang Afrika, tetapi mula-mula dimungkinkan oleh orang-orang Eropa. Impor barang-barang modal maupun konsumsi massa yang dimaksud untuk konsumsi rakyat Afrika, juga meningkat dari jumlah kecil menjelang akhir abad ke-19 menjadi volume luar biasa pada 1950-an. Perubahan-perubahan dengan akibat-akibat jangka jauh ini terungkap dalam statistik-statistik pendapatan pemerintah, kaum melek huruf, jumlah murid, kesehatan umum, kematian kanak-kanak dan banyak indikator lain seperti pemilikan mobil dan barang-barang konsumsi yang awet.”¹

Kita simpulkan bahwa tidak banyak kebenaran terdapat dalam gagasan yang banyak disiarkan bahwa negara-negara Barat melakukan pemindahan kekayaan dari koloni-koloni ke perekonomian-perekonomian mereka, suatu pemindahan yang membuat miskin koloni-koloni dan membuat kaya negara-negara induk. Kemajuan ekonomi perekonomian-perekonomian kapitalis yang mengesankan selama 150 tahun terakhir rupanya menopang dalil pemerasan, tetapi hanya kalau orang melupakan perkembangan yang sejalan di koloni-koloni. Ketika pendapatan nyata per kapita terus meningkat biarpun teori Marxis meramalkan kebalikannya, kemajuan ekonomi itu juga menguntungkan koloni-koloni. Bagaimanapun juga, semua indikator relevan menunjukkan suatu kenaikan dalam kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara itu. Berlawanan dengan sementara pendapat rakyat, perdagangan saling menguntungkan. Lagi pula, dekolonisasi sering mengakibatkan stagnasi ekonomi dan bahkan kemerosotan ekonomi. Kawasan di sebelah Selatan Sahara, Sri Lanka, Birma, Uganda, Bangladesh dan Pakistan merupakan contoh-contoh baik. Negara-negara lain mungkin nasibnya lebih baik, tetapi bahkan negara-negara itu seperti Aljazair atau India menunjukkan sedikit kemajuan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi mereka tahun-tahun sebelumnya, sedangkan suatu koloni seperti Hongkong terus berkembang.

Pola-pola yang berlainan itu mengungkapkan bahwa status kolonial dan dekolonisasi tidak relevan bagi kemajuan ekonomi. Sebagai gantinya, kemajuan serupa itu sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan dan lembaga-lembaga yang di-

¹ Peter Bauer, "Western Guilt and Third World Poverty", dalam *Commentary*, Januari 1976

kembangkan. Stagnasi yang menyusul dekolonisasi di banyak kasus adalah akibat suatu pergeseran penting menuju "program-program dan lembaga-lembaga sosialis", atau cepat meningkatnya ketidakstabilan politik atau ketidakpastian mengenai "peraturan-peraturan permainan sosial".

Suatu gagasan yang jelas disenangi dalam resolusi-resolusi PBB menunjuk pada hak yang harus dimiliki oleh negara anggota atas "kedaulatan atas sumber-sumber dayanya" agar dihormati oleh negara-negara lain. Orang dapat menanggapinya dengan mengangkat bahu dan mudah menyetujui artinya yang jelas. Tetapi kalimat itu memuat suatu arti khusus yang secara halus digabungkan dengan dalil pemerasan. "Kedaulatan atas sumber-sumber" dilaksanakan lewat nasionalisasi dan pemilikan yang sesuai oleh pemerintah. Lagi pula, "penentuan nasib ekonomi sendiri" dilaksanakan lewat suatu sistem kontrol politik-administratif atas besarnya dan alokasi sumber-sumber daya (manusia dan alam). Retorika yang dibina resolusi-resolusi PBB dengan demikian menunjuk pada pemusatan hak untuk menggunakan sumber-sumber itu pada oligarki yang berkuasa, perumus-perumus dan birokrasinya. "Kedaulatan" dan "penentuan" mengandung pembentukan suatu perekonomian sosialis dengan pengurangan hak-hak milik swasta dan suatu mekanisme politik-administratif yang menggantikan pasar atas suatu ruang kegiatan yang luas. Usaha mendapatkan "kedaulatan atas sumber-sumber daya" dan "penentuan aktif nasib ekonomi bangsa" menempatkan mayoritas besar penduduk di bawah intrik politik oligarki berkuasa yang menggunakan sarana-sarana itu untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka dan memperkaya pengikut-pengikut dan langganan-langganan mereka.

Namun gagasan itu menarik bagi kalangan-kalangan luas yang sulit mengerti bahwa suatu perekonomian berkembang tidak dapat memajukan kesejahteraannya lebih baik daripada membiarkan orang-orang asing membeli sumber-sumber daya alamnya dan secara demikian melibatkan kepentingan-kepentingan aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Apakah arus modal asing itu pasti menghasilkan pengaruh dan dominasi

politik banyak bergantung pada lembaga-lembaga yang berlaku. Firma-firma bisnis asing akan menanamkan modal untuk mendapatkan pengaruh politik dan manipulasi hanya sejauh investasi-investasi itu bisa memberikan keuntungan. "Kerapatan relatif" pemerintah dalam masyarakat adalah suatu faktor penting. Di hadapan suatu sektor pemerintah yang relatif kecil dan kekuasaan-kekuasaan untuk mengatur yang moderat, investasi dalam manipulasi-manipulasi politik hanya sedikit menguntungkan dan tetap pada skala kecil atau bahkan lenyap. Masalah politik yang timbul akibat firma-firma bisnis asing yang beroperasi di suatu negara berkembang terutama bersumber pada pengaruh birokrasi dan pejabat-pejabat pemerintah yang mapan dan pervasif. Dia meningkat dengan trend sosialis dalam politik dan lembaga-lembaga, dan menjadi suatu "penyakit endemi" lembaga-lembaga itu karena operator-operator mekanisme administrasi pemerintah merasa menguntungkan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ditentukan oleh posisi mereka. Namun transaksi-transaksi (tak halal) serupa itu rupanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi di atas tingkat yang dapat dicapai dalam konteks "kedaulatan atas sumber-sumber daya" yang kaku dan "penentuan nasib ekonomi" yang militan.

Tema pemerasan juga menimbulkan isu yang diajukan tentang terms of trade. Kadang-kadang dikemukakan bahwa bangsa-bangsa industri Barat memanipulasi terms of trade demi keuntungan mereka dan membuat miskin Dunia Ketiga yang menghasilkan bahan mentah. Tetapi terms of trade produsen-produsen barang-barang primer, menurut Sir Arthur Lewis, adalah lebih baik pada 1950-an daripada selama 80 tahun sebelumnya dan bahkan menjadi semakin baik pada 1960-an. Gambaran keseluruhan meliputi berbagai pengalaman di berbagai bagian kawasan berkembang. Lagi pula, manipulasi sengaja terms of trade oleh bangsa-bangsa industri demi keuntungan mereka akan menuntut tarif ekspor yang meningkat atas barang-barang jadi bersama-sama dengan naiknya tarif impor bahan mentah dan baku. Namun kita tidak menemukan pola serupa itu. Dalam kenyataan AS, Australia dan Kanada adalah pemasok utama sementara komoditi primer di pasaran dunia. Dalam

keadaan itu "manipulasi terms of trade" harus ditolak sebagai suatu isapan jempol yang berguna secara politik. Komentar Bauer dalam hubungan ini juga pantas dicatat:

"Bila perubahan-perubahan dalam biaya produksi, perbaikan penting dalam lingkup dan mutu impor, dan peningkatan luar biasa dan volume perdagangan diperhitungkan, daya beli ekstern dan ekspor Dunia Ketiga sebagai keseluruhan kini adalah sangat baik, mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Pada gilirannya hal itu mempermudah pemerintah-pemerintah untuk menahan bagian yang lebih besar dari pendapatan ekspor lewat peningkatan penting dalam tarif royalti, pajak ekspor dan pajak perusahaan."¹

VI

Sengketa mengenai dasar-dasar organisasi sosial dan ekonomi tidak dapat disingkirkan dengan kalimat-kalimat salah. Kita mungkin lebih suka dengan ketenangan, kejernihan dan kesunyian tanpa gangguan jauh dari keterlibatan kontroversial, tetapi isu itu menyentuh kehidupan dan prospek masyarakat kita. Bagaimanakah seharusnya posisi AS dalam persoalan-persoalan itu? Sudah barang tentu sangat baik bagi Washington untuk meninjau kembali trend yang muncul pada tahun-tahun terakhir di berbagai organisasi PBB. Kita hendaknya secara serius mempersoalkan kebijaksanaan untuk mengikuti trend itu dengan reservasi-reservasi bisu. Tapi manakah alternatif yang mungkin bagi suatu akomodasi yang kurang dipikirkan? Suatu alternatif program aksi yang mengungkapkan kepentingan-kepentingan jangka panjang AS, pada hemat kami, meliputi lima komponen penting berikut:

Perekonomian AS merupakan pusat vital perekonomian dunia, dan akibat-akibat politik dalam negeri AS terasa di seluruh dunia. Ketidakstabilan finansial AS secara substansial ikut mengakibatkan inflasi dunia pada tahun-tahun terakhir 1960-an dan pada awal 1970-an. Kebijakan-kebijaksanaan finansial yang ditempuh di AS juga menentukan rusaknya sistem yang ditetapkan di Breton Woods dan akhirnya — diperkuat oleh pemindahan kekayaan masif yang dilancarkan OPEC —

1 *Ibid.*

menghasilkan "stagflasi" yang terlihat dalam perekonomian negara-negara Barat. Penyelewengan-penyelewengan dan ketidakpastian ekonomi serupa itu menuntut biaya penyesuaian yang berat dari banyak negara. Oleh sebab itu pemulihan atau penyelamatan kestabilan finansial merupakan kewajiban pertama yang harus diterima oleh penyusun-penyusun politik AS. Hal ini berarti bahwa Washington harus mengembangkan serangkaian kebijaksanaan dan lembaga yang menjamin suatu pertumbuhan moneter yang mantap pada tingkat noninflasioner, dan suatu anggaran terkontrol dengan paling banyak suatu defisit kecil. Usaha memulihkan suatu pola kestabilan finansial yang dapat diandalkan akan menuntut suatu usaha politik penting dan suatu penyimpangan substansial dari trend-trend yang baru dan berlaku sekarang ini.

Komponen-komponen kedua dan ketiga program positif hendaknya diarahkan untuk membuka perekonomian kita secara substansial. Semua hambatan perdagangan harus disingkirkan atau dikurangi secara drastis. Kuota impor segala jenis dan hambatan impor harus dihapus secara sistematis — termasuk pengurangan dan penghapusan tarif-tarif. Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan akan memberikan peluang kepada negara-negara lain untuk menjual hasil-hasil mereka dan mendapatkan sarana untuk membiayai suatu lingkup impor yang meningkat dan membantu memperluas tingkat pendapatan nyata mereka. Kebijakan-kebijaksanaan itu juga akan ikut memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya perekonomian AS yang lebih efisien dan lambat laun akan menguntungkan rakyat AS. Lagi pula, penghapusan perdagangan secara sistematis harus dilengkapi penghapusan hambatan-hambatan investasi swasta di luar negeri atau hambatan terhadap pinjaman-pinjaman swasta kepada bisnis dan penduduk asing. Arus modal akan bergantung sebagian besar pada kondisi di negara-negara asing dan khususnya pada prediktabilitas dan stabilitas aturan-aturan permainan yang berlaku bagi bisnis dan investor asing. Dengan demikian kebijaksanaan-kebijaksanaan dan lembaga-lembaga Dunia Ketiga akan merupakan suatu penentu penting bagi arus modal dan sumbangan oleh perekonomian-perekonomian industrial bagi laju pertumbuhan.

Mengenai komponen keempat program, adalah perlu bahwa AS merumuskan suatu konsepsi koheren tentang kondisi-kondisi yang relevan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat. Pertumbuhan yang tidak pasti dan "stagnasi kemiskinan" bukanlah akibat sejarah kolonial atau akibat "neokolonialisme dalam segala bentuknya". Dalam periode sesudah Perang Dunia II kebanyakan negara berkembang melaksanakan politik dan suatu pola pranata-pranata yang secara sistematis menghambat dan memperlambat perkembangan ekonomi. Di semakin banyak negara kenyataan ekonomi dikorbankan demi tuntutan-tuntutan ideologi yang meningkat. Wakil-wakil Pemerintah AS harus belajar membela alternatif-alternatif program dan politik yang akan menyingkirkan belenggu-belenggu yang mengikat perekonomian-perekonomian berkembang. Program-program dan saran-saran itu harus dirumuskan dengan pengakuan penuh bahwa anggota-anggota Dunia Ketiga mempunyai hak untuk bergerak menurut keyakinan mereka. Tetapi apabila mereka tetap menekankan politik dan pranata-pranata yang menghambat perkembangan mereka dan menurunkan kesejahteraan mereka, tiada kewajiban moral pada bangsa-bangsa Barat untuk menyelamatkan mereka dengan injeksi sumber-sumber daya secara masif. Kegagalan bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa bantuan itu tidak efisien dan suatu pemborosan.¹ Segala bantuan harus diganti dengan transaksi-transaksi sukarela yang diadakan di pasar-pasar modal dan kredit yang terbuka.²

1 Lihat prasaran Peter Bauer, "Politicization of Knowledge: Development Economics", yang disiapkan untuk Seminar Interlaken Internasional Pertama tentang Analisa dan Ideologi Juni 1974, dan kemudian diterbitkan dalam *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*, 1975

2 Keprihatinan mengenai suatu krisis pangan yang permanen harus mendorong wakil-wakil Amerika Serikat untuk mengajukan alternatif-alternatif bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan pertanian dan penguasaan tanah di Dunia Ketiga. Tanzania belum lama berselang menerima model Soviet dan membentuk pertanian kolektif. Akibatnya hasil pertaniannya dapat diperkirakan. Ramifikasi-ramifikasi lebih halus yang mempengaruhi hasil pertanian dan penduduk timbul dari lain-lain sistem penguasaan tanah. Arthur DeVany misalnya menunjukkan dalam suatu studi menarik yang menggunakan data Meksiko (yang disiapkan untuk Konperensi Carnegie-Rochester mengenai Politik Pemerintah bulan April 1976) bahwa sistem pemakaian hasil yang terdapat di mana-mana menciptakan insentif-insentif untuk menurunkan hasil dan meningkatkan ukuran keluarga rata-rata.

Perhatian atas politik yang ditekankan pada paragraf sebelumnya mengantarkan komponen terakhir dalam suatu agenda positif. Wakil-wakil AS (dan bahkan sementara cendekiawan) hendaknya tegas menentang klaim-klaim sosialis di pasaran dunia untuk ide-ide. Kebenaran kapitalisme sebagai suatu rangkaian pranata luwes yang dimaksud untuk menjamin perjuangan yang terus-menerus bagi martabat manusia dan prestasi manusia memerlukan suatu perumusan yang mengobarkan semangat. Kita tidak boleh ragu-ragu menawarkan suatu visi tentang potensi manusia kita, biarpun hal ini mungkin menuntut perubahan-perubahan radikal dalam prosedur-prosedur dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar, seperti diungkapkan dalam konperensi pers pertama pengganti Duta Besar Moynihan yang dilaporkan dalam pers Eropa. Menurut laporan itu, Duta Besar William Scranton menekankan bahwa tiada isu asas yang fundamental menuju suatu konfrontasi antara AS dan banyak negara di dunia. Pandangan ini mungkin merupakan verbalisme standar "birokrasi diplomasi", tetapi kenyataannya tetap: kita dihadapkan dengan suatu tantangan serius dan ujian berat bagi pengertian kita tentang isu-isu fundamental dari organisasi sosial. Mengapa wakil-wakil AS terus-menerus gagal melihat atau mengakui adanya suatu konfrontasi di bawahnya adalah suatu teka-teki. Mungkin, karena trend dalam negeri kita berpaling secara tajam ke arah yang secara implisit diperjuangkan TEIB, banyak politisi dan perumus profesional dapat menanggapi secara simpatik retorika sosialis yang disajikan oleh organisasi-organisasi PBB dan Dunia Ketiga. Tetapi biaya jangka panjang diukur dengan nilai-nilai manusia akan tinggi di jalan ini. Kita masih bisa belajar dan menggariskan suatu visi tentang kesempatan-kesempatan manusia yang harus ditawarkan kepada dunia.